

DARI KYUUSHUU KE *RAN'IN*: *KARAYUKI-SAN* DAN PROSTITUSI JEPANG DI INDONESIA (1885-1920)

Sri Pangastoeti*

ABSTRACT

Karayuki-san is a term referring to Japanese women who worked as prostitutes abroad from the Meiji Period (1868-1912) to the World War II. This study investigates the various conditions that encourage Japanese women to be *karayuki-san*, to understand the kinds of exploitations that the *karayuki-san* experienced during their journey to Indonesia and worked as prostitutes in some cities in Indonesia. The main data sources for this research are some diplomatic records (confidential and disclosed) obtained from the Japanese Consulate in Singapore and Batavia from Meiji 28 (1895) to Taisho 4 (1915), Dutch Colonial Governments Regulations related to Japanese migrants, particularly those collected in the Missive Gouvernements Secretaris (Mgs), and dialog records between Yamazaki Tomoko and the ex-*karayuki-san* that were recorded in *Sandakan Hachiban Shookan (Sandakan No.8 Brothel)*.

Key Words: *Karayuki-san*, prostitusi, broker, Netherlands Indie.

PENGANTAR

Pada Zaman Meiji (1868-1912), untuk mendukung program utama yang disebut *fukoku kyoohai* (negara kaya militer kuat), pemerintah Jepang menekankan pembangunan sektor industri dan hubungan dengan negara-negara Barat. Asia (selain Cina) bukanlah wilayah yang dianggap penting karena banyak yang sedang dalam penguasaan negara-negara barat. Namun, tidak berarti sama sekali tidak ada orang Jepang yang melakukan kontak dengan negara Asia, dan pemerintah Meiji pun sebenarnya mengakui hal ini (Yano, 1975:34).

Pengakuan pemerintah Meiji akan adanya imigran Jepang di luar negeri—dalam istilah Jepang disebut *imin*—terlihat dengan ditetapkannya Undang-undang Perlindungan Imigran pada bulan April tahun Meiji 29 (1896). Selama empat tahun urusan imigrasi hanya ditangani

oleh pemerintah, tetapi pada Agustus tahun Meiji 34 (1901) pemerintah mengizinkan pihak swasta untuk menangani orang Jepang yang akan bermigrasi ke luar negeri (Yano, 1975:34).

Migrasi Jepang ke Asia Tenggara pada awalnya lebih didorong oleh keinginan untuk berdagang sebagai mata pencaharian utama, dan ini banyak dilakukan oleh penduduk di Jepang selatan, khususnya Kyuushuu, yang wilayahnya kurang subur. Saat itu mereka menyebut wilayah Asia Tenggara dengan sebutan *Nanyoo* yang arti secara harafiah adalah Lautan Selatan. Di Indonesia, pada tahun Meiji 30 (1897) terdapat 125 orang Jepang yang terdiri atas 25 laki-laki dan 100 perempuan. Sementara itu, menurut survei dari Konsulat Jepang di Indonesia, pada tahun Meiji 42 (1909) terdapat 614 orang Jepang, terdiri dari 166 laki-laki dan 448 perempuan (Yano,

* Staf Pengajar Program Studi Sastra Jepang, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

1975:34; Shimizu, 1992:20-21). Mereka terlibat dalam aktivitas pertanian, perikanan, perdagangan, dan juga dalam *improper trades* seperti pelacuran dan usaha rumah-rumah bordil.

Pelacuran yang dilakukan oleh perempuan-perempuan Jepang di luar negaranya pada masa itu lazim disebut *karayuki-san*. Jumlah *karayuki-san* pada awal masa Meiji sekitar 100.000 orang, tersebar di enam wilayah, yaitu Siberia, Manchuria, Kwantung, daratan Cina, Asia Tenggara, Amerika Utara, Amerika Selatan, Oceania, dan Afrika (Sone, 1992:44-47). Indonesia sebagai salah satu wilayah Asia Tenggara juga merupakan daerah yang banyak didatangi *karayuki-san*. Di sini sebenarnya sudah ada pelacuran yang lebih dahulu hidup, bahkan diawasi oleh penguasa saat itu, yaitu pemerintah kolonial Belanda. Kedatangan *karayuki-san* menjadikan dunia pelacuran di Indonesia makin kompleks.

Permasalahan pokok yang akan menjadi fokus perhatian tulisan ini adalah kondisi sosial *karayuki-san* dan prostitusi Jepang di Indonesia pada masa kolonial 1885-1920. Permasalahan ini menyoroti berbagai kondisi yang melatarbelakangi perempuan Jepang menjadi *karayuki-san*, dan perlakuan yang mereka dapatkan sejak meninggalkan kampung halamannya sampai tiba di Indonesia. Selain itu, pokok permasalahan ini juga menyangkut prostitusi Jepang di Indonesia. *Karayuki-san* dan prostitusi Jepang merupakan dua hal yang sangat berhubungan erat. *Karayuki-san* merupakan bagian dari lingkaran prostitusi Jepang di luar negeri, termasuk di Indonesia. Secara pribadi seorang *karayuki-san* dapat menjalankan pekerjaannya tanpa ada keterikatan dengan seorang mucikari atau rumah bordil tertentu. Namun, prostitusi Jepang tidak akan dapat hidup tanpa keberadaan *karayuki-san*.

Konsep dasar dari kajian ini ada pada kata *karayuki-san* dan prostitusi. *Karayuki-san* adalah istilah untuk menyebut sosok perempuan Jepang yang bekerja sebagai pelacur (*prostitute*), sedangkan yang dimaksud dengan prostitusi adalah padanan kata dalam bahasa Inggris *prostitution: the practice of working as a prostitute* (*Oxford Advanced Learner's Dictionary of*

Current English 1995:931) mengacu pada makna pelacuran.

Dalam kajian ini kata "pelacuran" lebih banyak digunakan dari pada kata "prostitusi", dengan alasan dari kata "pelacuran" ini lebih mudah digunakan kata-kata turunannya, yaitu pelacur (menunjuk ke orangnya), dan melacur (menunjuk pekerjaannya). Pelacuran yang dimaksud di sini adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah-hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan. Terkait dengan definisi ini, dalam pelacuran paling tidak terkait tiga unsur, yaitu hubungan seksual, pembayaran, dan pengabaian faktor emosi (Truong, 1992:11-12). Unsur hubungan seksual dan pembayaran memang dua hal yang terkait erat dengan profesi *karayuki-san* karena mereka akan menerima pembayaran setelah melayani pelanggannya. Pengabaian faktor emosi yang dimaksud di sini adalah unsur pemaksaan yang dilakukan oleh para perantara, mucikari, atau pelanggan. Mereka yang melakukan pemaksaan terhadap *karayuki-san* ini tidak pernah peduli akan kondisi—baik fisik maupun kejiwaan—dari *karayuki-san*. Apa pun kondisinya, *karayuki-san* harus siap melayani pelanggan, termasuk dalam keadaan lelah atau sakit.

Ada berbagai alasan yang perlu dilihat mengapa seorang perempuan Jepang menjadi *karayuki-san*. Ekonomi memang merupakan kondisi utama (*necessary condition*), tetapi banyak fakta menunjukkan bahwa kondisi ini didukung oleh *sufficient condition* berupa kondisi sosial dan kultural, baik di Jepang maupun di Indonesia. Berbagai kondisi tersebut tidak berdiri sendiri. Ada semacam interdependensi, sehingga sulit, bahkan tidak mungkin, membahas satu kondisi dengan mengesampingkan kondisi yang lain (Kartodirjo, 1992:54, 93-100; Kuntowijoyo, 2003:39-47). Pendekatan dengan melihat interdependensi antar berbagai kondisi diharapkan akan mampu menjawab tidak saja pertanyaan mengapa, tetapi bagaimana seorang perempuan Jepang menjadi pelacur di negeri yang jauh, baik secara geografis maupun kultural (Warren, 1992:2-4). Pertanyaan bagaimana sangat penting dikemukakan, ter-

utama untuk mengungkap *sufficient condition* yang antara lain berupa penculikan, perdagangan manusia, dan perbudakan terselebung. Dua unsur pertama banyak dilakukan oleh para perantara atau *broker* di kampung halaman dan di wilayah atau pelabuhan transit, dan unsur ketiga banyak dilakukan oleh para mucikari yang menjadi *oyakata* (majikan) atau oleh "tuan" / "suami" mereka (ketika menjadi istri simpanan).

MENGAPA MENJADI KARAYUKI-SAN

Karayuki-san berasal dari berbagai wilayah di Jepang, tetapi yang terbanyak adalah dari Semenanjung Shimabara (Prefektur Nagasaki) dan Pulau Amakusa (Prefektur Kumamoto). Kedua wilayah ini terletak di Kyuushuu, Jepang barat daya, dan sering dijuluki *Kyuushuu heichi* atau daerah terpencil di Kyuushuu. Pada Zaman Meiji (1868-1912) wilayah tersebut terkenal sebagai daerah dengan penduduk yang miskin, tanah yang tandus, dan dikelilingi pegunungan yang gersang.

Ada empat faktor yang sering disebut faktor pendorong dan penarik (*push and pull factors*) (Schoorl, 1981:266) yang melatarbelakangi seorang perempuan Jepang menjadi *karayuki-san*. Kemiskinan, budaya, dan model dari *karayuki-san* yang sukses dapat dimasukkan dalam faktor pendorong, dan kondisi di luar Jepang merupakan faktor penarik.

Kemiskinan di Amakusa dan Shimabara dipicu oleh faktor alam dan kebijakan pemerintah Meiji (1868-1912) yang tidak adil. Kedua faktor ini pada akhirnya melahirkan *over-ruralisasi*, yaitu jumlah penduduk di pedesaan lebih banyak dari pada yang dapat dijamin oleh situasi ekonominya (Schoorl, 1981:266). Faktor alam yang dimaksud adalah tanah yang tidak subur, gersang, dan miskin sumber air. Kondisi alam yang seperti ini diceritakan oleh seorang mantan *karayuki-san* bernama Osaki bahwa betapapun tanah digali dan diberi pupuk, hanya ubi-ubian dan lobak saja yang dapat tumbuh. Lebih jauh lagi, Osaki menceritakan kondisi keluarga dan lingkungannya sebagai berikut:

Memasuki usia sekitar 9-10 tahun, agar dapat makan kakak laki-lakiku bekerja di sebuah keluarga petani yang tinggal di dekat rumah sebagai pengasuh anak. Setelah itu hidup kami sedikit lebih enak. Pagi hari kami hanya minum air, siang dan saat matahari terbenam seringkali hanya sepotong ubi saja yang masuk ke mulut.

Karena harus bekerja, kami sehari pun tidak pernah pergi ke tempat yang dinamakan sekolah. Kakak laki-laki, kakak perempuan, dan aku sendiri sama sekali tidak sekolah. Sebenarnya yang tidak bersekolah bukan hanya kami, tetapi di desa kami sangat banyak anak-anak yang tidak bersekolah. Karena tidak bersekolah, kami tidak dapat membaca. (Yamazaki, 1972:66-67).

Tandusnya tanah di Shimabara dan Amakusa tidak memungkinkan para petani untuk mendapatkan hasil yang memuaskan pada saat panen. Sekedar mencukupi kebutuhan keluarga pun masih kurang sehingga banyak yang hanya mengkonsumsi bubur atau umbi-umbian sebagai makanan pokok.

Kondisi tanah yang tandus diperparah lagi oleh kebijakan pemerintah Meiji (1868-1912) yang tidak pernah berpihak kepada petani miskin. Sejarah panjang Jepang memang banyak mempunyai fakta bahwa kemiskinan yang dialami petani disebabkan petani selalu menjadi sandaran pemerintah untuk mengisi kas negara karena jumlah mereka jauh lebih besar daripada golongan masyarakat lain. Penjelasan berikut dapat menjadi gambaran bagaimana petani (terutama petani penggarap) diperlakukan oleh pemerintah yang sedang berkuasa sehingga mereka selalu hidup dalam kemiskinan.

Sebelum Zaman Meiji, yaitu pada Zaman Tokugawa (1603-1868), pemerintah menggolongkan masyarakat ke dalam kelas *shi-no-ko-sho* yaitu *bushi* (militer), *noomin* (petani), *kosakunin* (tukang), dan *shoonin* (pedagang). Saat itu jumlah kaum *bushi* sekitar 7 %, petani 84 %, tukang dan pedagang 6 %, sisanya adalah kelompok di luar keempat golongan itu, misalnya para pendeta, kaum ningrat, dan

golongan yang dianggap sangat bawah seperti para penjaga kubur dan penyembelih binatang. (Inoue, 1993:172-173). Jumlah mereka yang besar seharusnya juga menguntungkan, tetapi secara politis kedudukan mereka ternyata lemah, karena pemerintahan dikuasai oleh kaum militer dengan *shogun* sebagai pemimpin tertinggi. Petani dibebani pajak tahunan (*nengu*) berupa hasil panen yang besarnya 50 %-60 % dari hasil panen, bahkan di beberapa *han* (wilayah kekuasaan para tuan tanah/*daimyo*) ada yang mencapai 70 %. Ini berarti bagian yang harus diserahkan kepada pemerintah sebagai pajak dapat mencapai lebih dari setengah hasil panen secara keseluruhan. Sisanya yang kurang dari setengahnya digunakan untuk kebutuhan keluarga. Akibat kebijakan itu, kaum petani yang merupakan mayoritas penduduk, termasuk di daerah asal mayoritas *karayuki-san* yaitu Amakusa dan Shimabara, tetap hidup dalam kemiskinan.

Memasuki Zaman Meiji (1868-1912), kondisi petani tidak banyak berubah. Modernisasi yang dilakukan oleh pemerintah Meiji lebih diarahkan untuk mencapai sasaran *fukoku kyoohi* (negara kaya, militer kuat). Untuk menuju sasaran sebagai negara kaya, pemerintah melakukan industrialisasi dengan membangun industri berat dan ringan. Ahli-ahli dari barat banyak dikontrak untuk mendidik orang Jepang dalam mengembangkan teknologi, dan pemuda-pemuda Jepang yang pandai dikirim ke luar negeri untuk mendalami teknologi. Modernisasi dengan sasaran agar menjadi negara kaya dengan militer yang kuat ternyata berjalan tidak merata. Industrialisasi hanya berkembang di perkotaan karena sarana lebih mudah dibangun, dan pemuda-pemuda pandai yang dikirim belajar juga kebanyakan berasal dari keluarga mampu. Mereka kebanyakan tinggal di perkotaan dan mempunyai hubungan yang erat dengan pejabat-pejabat pemerintah. Golongan ini sebagian besar terdiri dari kaum militer (*bushi*) kelas atas dan kaum bangsawan. Penggolongan masyarakat dalam kelas militer, petani, tukang, dan pedagang secara resmi memang dicabut oleh peme-

rintah Meiji. Namun demikian kebijakan ini tidak begitu saja mampu menghilangkan kelas-kelas sosial tersebut dan kemudian menyamakan kedudukan keempatnya.

Dalam masa modernisasi yang ditandai oleh pembangunan industri ini, pemerintah memang berusaha juga untuk memperhatikan petani dengan memperbaiki peraturan pajak (*chiso kaisei*) dari hasil panen menjadi uang tunai sebesar 3 % dari harga tanah, dan membebaskan pajak ini kepada pemilik tanah (*jinushi*). Namun, para pemilik tanah melemparkan tanggungjawab ini kepada petani penggarap (*kosakunin*) dengan memaksa mereka untuk menyerahkan lebih dari 60 % hasil panennya kepada pemilik tanah (Yamazaki, 1995:33-34). Kondisi ini akhirnya menyebabkan banyak petani meninggalkan lahan garapan mereka, kemudian pergi ke kota untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Kepergian mereka selain dibebani kewajiban untuk menghidupi diri sendiri juga harus menanggung keluarganya di kampung, sehingga di kota pun mereka harus bekerja keras. Namun selain bertani, mereka tidak mempunyai ketrampilan lain. Bagi laki-laki memang dapat bekerja dengan mengandalkan kekuatan fisiknya, tetapi bagi perempuan kesempatan yang tersedia hanyalah menjadi buruh di pabrik pemintalan dan menjadi pelacur. Di pabrik pemintalan pun upahnya kecil, sehingga mereka yang harus menanggung beban keluarga di kampung tidak mempunyai pilihan lain selain menjadi pelacur.

Kondisi seperti di atas tidak dipungkiri oleh pemerintah Jepang. Hal ini dapat dilihat dalam laporan Konsul Jepang di Singapura bernama Fujita Toshiroo kepada Menteri Luar Negeri Hara Kei tanggal 16 November tahun Meiji 28 (1895). Dalam laporan itu disebutkan bahwa 8 atau 9 dari 10 perempuan Jepang yang menjadi pelacur di luar negeri disebabkan oleh kemiskinan (DRO 715.4, vol.1, Surat Rahasia No. 14, tanggal 16 Nopember 1895).

Faktor berikut yang menjadi pendorong seorang perempuan menjadi *karayuki-san* adalah budaya patriarki. Budaya patriarki yang

berlaku saat itu mewajibkan perempuan yang telah berkeluarga untuk mengabdikan kepada suami secara total. Di dalam hidupnya seorang perempuan dituntut agar mengabdikan kepada tiga pihak (*triple obedience*), yaitu kepada ayahnya saat dia masih muda dan belum menikah, kepada suaminya saat dia berumah tangga, dan kepada anak laki-lakinya saat dia tua (Bingham dan Gross, 1987:32). Aktivitas di luar rumah termasuk mencari nafkah, apalagi sampai ke luar negeri, cenderung merupakan tanggungjawab laki-laki. Secara singkat dapat dikatakan bahwa peran perempuan adalah "di dalam", sedangkan laki-laki adalah "di luar" rumah.

Namun, yang terjadi di Amakusa dan Shimabara dalam masalah *karayuki-san* pada Zaman Meiji adalah hal yang sebaliknya. Dalam masyarakat yang patriarkhis itu justru perempuanlah yang bertugas sebagai tulang punggung rumah tangga, mencari nafkah bagi keluarganya sampai jauh ke luar negeri, walaupun di rumah ada ayah dan saudara laki-lakinya. Artinya, ruang gerak perempuan tidak hanya sebatas lingkungan rumah tangga saja. Patriarkhi muncul sangat nyata dalam bentuk penindasan, dominasi, dan eksploitasi laki-laki atas perempuan. Eksploitasi ini bukan saja secara fisik, tetapi juga ekonomi, seksual, dan emosional. Tiga wanita yang berasal dari Amakusa, yaitu Kitagawa Saki (Osaki), Shooda Hana (Ohana), dan Takeshita Tsugiyo mengalami eksploitasi semacam ini (Yamazaki, 1972: 76, 77). Pada awalnya, mereka bertiga tidak tahu akan dijadikan sebagai pelacur di luar negeri, demikian juga orang tuanya. Mereka hanya diminta untuk membantu ekonomi keluarga, dan pekerjaan semula yang dijalani adalah menjadi pengasuh anak dari keluarga tetangganya yang kaya. Kemudian, ada tawaran untuk bekerja di luar negeri dengan gaji yang besar, dan semua biaya selama mereka belum mendapatkan pekerjaan akan ditanggung oleh pihak yang menawarkan. Sebagai imbalan "menitipkan" anaknya, orang tua mereka mendapatkan uang sebesar 300 yen untuk satu anak.

Sebenarnya ini adalah awal dari eksploitasi yang dialami oleh *karayuki-san*, karena di beberapa pelabuhan persinggahan mereka

"dijual" kepada perantara lain, bahkan dengan harga yang lebih mahal. Pada tahun Meiji 3-4 (1870-1871), "harga jual" perempuan itu di Hongkong (dalam perjalanan menuju Singapura) dan di Singapura (dalam perjalanan menuju negeri-negeri selatan) adalah 500 yen (Morisaki, 1976:75). Dari beberapa pihak yang mengeksploitasi *karayuki-san*, bentuk pertamalah – yaitu dari keluarga sendiri – yang paling besar pengaruhnya terhadap banyaknya *karayuki-san*. Eksploitasi oleh laki-laki terdekatnya dimungkinkan karena perempuan dalam sebuah keluarga patriarkhis dianggap sebagai aset yang berharga pada saat keluarga itu berada dalam kesulitan ekonomi.

Faktor pendorong berikut adalah model dari *karayuki-san* yang sukses, dan kriteria sukses ditentukan oleh kepemilikan materi. Jika istilah *karayuki* mengacu pada perempuan yang pergi ke luar negeri sebagai pelacur, maka ada satu istilah yang bermakna sebaliknya, yaitu *kara kudari*. Istilah ini mengacu pada *karayuki-san* yang kembali ke kampung halamannya, lebih spesifik lagi yang sukses, yakni pulang kampung dengan membawa uang banyak, kemudian membangun rumah yang mewah. Cincin emas dan tusuk konde yang mengkilap berlapis emas juga banyak membuat tetangga kagum. Penampilan seperti itu menunjukkan bahwa mereka mempunyai materi yang cukup, dan itu semua dimungkinkan karena mereka bekerja sebagai *karayuki-san*. Jumlah mereka memang tidak banyak, tetapi pengaruhnya dalam memotivasi orang-orang di lingkungannya untuk menjadi *karayuki-san* cukup besar (Yamazaki, 1995:25-33).

Berikut adalah kondisi di luar Jepang yang merupakan faktor penarik (*pull factor*) bagi perempuan Jepang untuk menjadi *karayuki-san*. Kondisi ini terkait dengan kebijakan pemerintah Jepang yang berusaha mengembangkan kekuatan ekonominya ke selatan sebagai langkah awal membentuk wilayah koloni. Untuk wilayah Asia Tenggara, daya tarik terutama ada di Singapura yang pada akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20 telah menjadi tempat yang ramai dikunjungi oleh orang asing terutama Cina, Eropa, dan India.

KARAYUKI-SAN DI INDONESIA PADA AKHIR ABAD 19 SAMPAI AWAL ABAD 20

Karayuki-san masuk ke Indonesia melalui Singapura, kemudian menuju Sumatera, dan dari Sumatera memasuki Jawa. Sebenarnya di Indonesia sendiri, sebelum para pelacur Jepang datang telah terdapat pelacur Belanda, Cina, dan Indonesia (Ingleson, 1999:123-138).

Konsulat Jepang di Singapura bulan Desember tahun Meiji 28 (1895) melaporkan bahwa sebagian besar perempuan Jepang yang datang di Indonesia berprofesi sebagai pelacur (DRO 715.4, Vol. 1, Surat Rahasia No.14, tanggal 16 Nopember 1895 ; *De Indische Gids* tahun 1907 (II) hal. 1097 dan tahun 1910 (I) hal. 115-116; Morisaki, 1976: 233) dan dalam data mengenai jenis pekerjaan, para pelacur dimasukkan satu kelompok dengan pengusaha restoran.

Dalam beberapa sumber disebutkan bahwa para pelacur tidak hanya terdapat di rumah-rumah bordil. Beberapa restoran dan penginapan juga menempatkan *karayuki-san* di dalamnya. Hal ini dilakukan selain untuk menghindari sanksi sosial, juga untuk menghindari pengawasan yang cukup ketat dari pemerintah kolonial.

Catatan mengenai prostitusi Jepang dan *karayuki-san* di Indonesia yang cukup rinci dibuat oleh Muraoka Iheiji, seorang *broker* besar yang banyak membawa perempuan dari Jepang untuk dijadikan pelacur di Asia Tenggara (Muraoka, 1960). Tahun Meiji 27 (1894) merupakan saat Muraoka banyak berkeliling ke beberapa daerah, yaitu Banjar-

masin, Surabaya, dan Makassar. Pada saat meninggalkan Singapura menuju Indonesia, ia membawa sekitar 7-8 orang perempuan. Di Banjarmasin ia mengaku membuka usaha potong rambut dengan usaha sampingan rumah bordil. Setelah lima bulan, ia meninggalkan Banjarmasin menuju Surabaya dan membuka usaha kedai kopi. Di kedai kopi ini pun ia menempatkan perempuan. Muraoka kemudian menjadikan Surabaya sebagai pusat usahanya. Menurut sumber lain, di Surabaya pada saat itu, tepatnya tahun Meiji 27-28 (1894-1895), sudah terdapat rumah-rumah tinggal yang dihuni oleh *karayuki-san* terutama di sekitar pelabuhan Tanjung Perak. Dari Surabaya Muraoka kemudian menuju Semarang, Batavia, dan Probolinggo. Pada saat berkeliling ke berbagai kota, ia menjalankan profesi sebagai pedagang keliling yang berjualan kain sarung (Muraoka, 1960:105-110). Di beberapa tempat yang disinggahi, ia bertemu dengan perempuan Amakusa. Bulan Oktober 1894 ia meninggalkan Surabaya menuju Makassar, dan di sana mendirikan rumah bordil dengan 15 *karayuki-san*, membuka usaha dagang barang kelontong, dan potong rambut. Saat di Makassar, Muraoka mendapat tawaran dari temannya di Manila agar membuka rumah bordil di sana. Melihat keuntungan besar yang kemungkinan dapat diperoleh, Muraoka memutuskan untuk meninggalkan Makassar. Bersama 15 *karayuki-san* yang dibawanya dari Makassar, ia tiba di Manila tanggal 10 Oktober tahun Meiji 33 (1900). Berikut adalah nama dan asal ke-15 perempuan itu.

Tabel 1. Karayuki-san yang bersama Muraoka Iheiji meninggalkan Makassar menuju Manila pada tanggal 10 Oktober tahun Meiji 33 (1900)

No.	Nama	Asal
1.	Harada Goichi	Hiroshima
2.	Fujimoto Kumataroo *	Kumamoto
3.	Kooga Osayo	Amakusa
4.	Imafuku Otake	Amakusa
5.	Fukuda Okazu	Nagasaki
6.	Unehara Ohana	Nagasaki
7.	Kooga Otaka	Amakusa
8.	Yoshida Yone	Shikoku
9.	Isonaga Saku	Nagasaki
10.	Fukuyama Satsu	Nagasaki
11.	Watanabe Matsu	Nagasaki
12.	Miyazaki Kiyo	Amakusa
13.	Oota Haru	Nagasaki
14.	Tanaka Yoshi	Saga
15.	Tanaka Kin	Amakusa
16.	Senmotsu Ogiyo	Shimane

Sumber: Muraoka dalam Mori, 1959:140

* Ini adalah nama laki-laki. Kemungkinan besar ia adalah kaki tangan Muraoka Iheiji yang ikut mengawal *karayuki-san*.

Dalam lampiran catatan Muraoka, tahun Meiji 22 (1889) di beberapa kota di Indonesia sudah ada bordil Jepang dengan beberapa *karayuki-san* di dalamnya. Berikut adalah daftar mereka.

Tabel 2: Pelacuran Jepang di Beberapa Kota di Indonesia dalam Naskah Muraoka Iheiji

Kota	Jumlah Bordil	Pemilik Bordil	Karayuki-san
Medan	2	Okayo Umeda Nanigashi (N)*	10 orang 10 orang
Pontianak	tidak diketahui	—	10 orang dan 10 dalam rencana
Banjarmasin	tidak ada	Takaragawa N (rencana)	8 orang (rencana)
Semarang	1	Yoshida N Shimatsu N	8 orang 10 (rencana)
Batavia	2	Osono dan Uchida N Tachikawa N	12 orang 12 (rencana)
Surabaya	Tidak ada izin Kedai kopi <i>Ice shop</i>	Uchida N Nampo N dan Ito N	3 orang Masing-masing
Makassar	4	Uchida N Doi N Araki N Fukumoto N	4 orang 4 orang 5 orang 5 orang 4 orang
Ambon	Tidak ada	Egawa N (pemain akro bat) tahun 1887 tiba dengan 15 perempuan	Tidak ada data apakah ke 15 perempuan itu pemain akrobat atau <i>karayuki-san</i>

Sumber: Muraoka dalam Mori, 1959:77-82

* Nanigashi adalah kata yang menerangkan bahwa orang tersebut hanya diketahui nama keluarganya saja. Selanjutnya disingkat N.

Pada tabel 2 di atas terlihat bahwa penempatan *karayuki-san* di sejumlah kota masih dalam rencana. Tidak didapat sumber lebih lanjut apakah rencana itu direalisasikan atau tidak. Kemudian, mengenai Surabaya, Muraoka beranggapan bahwa kota ini paling terkenal akan pelacurannya. Ia pernah mencoba membuka rumah bordil di sana, tetapi tidak mendapatkan izin dari kepolisian sehingga memindahkan rencananya ke Makassar (Muraoka, 1960:107). Pemerintah kolonial Belanda sendiri mempunyai data yang sedikit berbeda mengenai prostitusi Jepang di Makassar. Menurut catatan yang diperoleh dari Asisten Residen Makassar, tahun 1888 hanya ada 1 pelacur Jepang dan tidak tinggal di rumah bordil. Namun, tahun 1889 bertambah menjadi 13 orang dan berada dalam 2 rumah bordil, sedangkan tahun 1890-1891 jumlahnya 3-4 orang berada dalam 1 rumah bordil (ANRI, BT 10 Agustus 1891 No.4). Kemudian, mengenai pelacuran Jepang di Medan, data yang tertera dalam tabel di atas hanya sebagian kecil saja. Diperkirakan jumlahnya jauh lebih besar (Muraoka, 1960:78), paling tidak karena dua alasan. Pertama, Medan merupakan kota besar yang cukup dekat dengan Singapura. Sebagaimana disebut di atas, Singapura merupakan pelabuhan transit terakhir sebelum mereka memasuki Indonesia. Kedua, di Medan industri perkebunan tembakau, karet, dan kelapa sawit sedang dikembangkan oleh pemerintah, dan untuk itu banyak dibutuhkan tenaga kerja. Selain orang pribumi, pemerintah juga mendatangkan pegawai dari Belanda yang bertugas sebagai pengawas sebagian besar masih bujangan dan yang sudah berkeluarga pun meninggalkan anak dan istrinya di kampung halaman. Dalam kondisi seperti itu, pelacuran menjadi tempat para pekerja itu melepaskan kebutuhan biologisnya. Jadi, selain untuk transit ke kota lain, ada kemungkinan Medan juga memerlukan kehadiran *karayuki-san*. Di sisi lain, banyak perantara yang melihat bahwa kebutuhan akan pelacur Jepang di Singapura sudah mencukupi karena di Singapura selain Jepang, pelacuran Cina juga cukup

ramai. Oleh karena itu, *karayuki-san* yang belum mendapatkan pelanggan dibawa ke Medan.

Di Indonesia para *karayuki-san* dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu mereka yang berpraktek di rumah-rumah bordil, ditempatkan sebagai pelacur terselubung di restoran, kedai kopi (*coffee shop*), salon, penginapan, dan menjadi pembantu rumah tangga merangkap istri simpanan (*concubine*) majikan. Mereka yang berpraktik di rumah bordil lebih mudah diketahui keberadaannya, tetapi yang bekerja sebagai pelacur terselubung atau istri simpanan relatif sulit dilacak oleh pihak konsulat untuk didata.

Seperti yang dijelaskan di atas, Muraoka Iheiji dalam perjalanannya ke beberapa kota untuk berdagang, juga mendirikan rumah-rumah bordil dan membawa serta *karayuki-san* untuk bekerja di rumah bordil yang ia dirikan. Jadi, seorang *karayuki-san* yang bekerja di sebuah rumah bordil di satu kota kemungkinan telah bekerja di kota lain sebelumnya. Dalam usaha mendirikan rumah bordil atau membuka kedai kopi yang memperkerjakan *karayuki-san*, Muraoka biasanya memanfaatkan orang Jepang yang sebelumnya telah bermukim di kota tersebut.

Di rumah-rumah bordil di Batavia, seorang *karayuki-san* kemungkinan besar datang langsung dari Jepang, Singapura, atau sebelumnya telah bekerja di kota lain di Indonesia. Mereka yang datang dari Jepang sebenarnya bukan menempuh jalur langsung Jepang-Batavia, tetapi melalui Singapura atau Hongkong. Hongkong atau Singapura dapat sekadar menjadi tempat transit, tetapi dapat juga di kedua negara tersebut mereka bekerja lebih dahulu di rumah bordil yang telah ada. Apakah harus bekerja lebih dahulu atau sekadar transit sangat bergantung kepada keinginan para perantara yang membawa mereka dari Jepang.

Di Batavia para *karayuki-san* kebanyakan bekerja di rumah-rumah bordil yang dimiliki oleh orang Jepang juga. Rumah bordil dan *karayuki-san* di Batavia dilaporkan oleh Konsul Ukita Satoji kepada pejabat di Kementerian Luar Negeri Makino Nobuaki sebagai berikut.

Tabel 3 : Rumah bordil dan *Karayuki-san* di Batavia (Sampai akhir Agustus 1913)

Pemilik bordil	Nama Pelacur	Daerah Asal	Umur (tahun)	Domisili sebelumnya	Tinggal di Batavia
Kaneko K	Itoya Hana	Hiroshima	24	Pontianak	Dari Juni t.l.*
	Takatsune Toyo	Okayama	24	Jepang	Dari Maret t.i*
	Sumie Han	Hyogo	25	Singapura	Dari April t.i
	Kawada Ezu	Kagawa	25	Singapura	Dari Maret t.i
Matsunaga Hama			45		
Ito Yuki	Tanaka Koyo	Nagasaki	30	Jepang	8 tahun
	Tomioka Asa	Kumamoto Kagawa	24	Singapura	Dari Feb t.l
Tsujiimoto Kiyō			40		
	Kano Toru	Nagasaki	27	Jepang	8 tahun
	Sekiguchi K Urashima Saya	Nagasaki Chiba Nagasaki	25 29	Surabaya Jepang	4 tahun 8 tahun
Fukui Toshi					
	Uesugi Fumi	Nagasaki	26	Jepang	8 tahun
	Matsuo Shige	Nagasaki	21	Jepang	6 tahun
	Tanaka Rei	Nagasaki	22	Semarang	4 tahun
	Nakamura T	Nagasaki	25	Singapura	3,5 tahun
	Nakamura Kiku	Nagasaki	27	Jepang	8 tahun
	Fukuda Toyo	Nagasaki	38	Jepang	11 tahun
	-- Tsuki	Nagasaki	36	Jepang	5 tahun
	Tagawa Riki	Oita	27	Jepang	3 tahun
		Nagasaki	21		

Sumber : DRO 4.2.2.27, vol 4, Surat Terbuka No. 199, tanggal 10 September 1913.0

Keterangan : t.l: tahun lalu; t.i: tahun ini

Tahun sebelumnya, yaitu Meiji 45 (1912), Konsul Jepang di Batavia sebenarnya juga telah mendata keberadaan orang-orang Jepang di Indonesia (DRO 715.4, Vol. 4, Surat Terbuka No. 38, tanggal 14 Maret 1912). Menurut data tersebut, jumlah perempuan Jepang yang ada di wilayah kontrol Konsulat Batavia adalah 986 orang. Diperkirakan jumlah sebenarnya lebih dari 1000 orang dan yang menekuni pekerjaan "bersih" hanya sekitar 4-5 orang. Sebagian besar yang lain menekuni pekerjaan yang

dianggap "hina" atau tidak terhormat, terutama sebagai pelacur dan pekerjaan lain yang terkait dengan pelacuran.

Tahun Taisho 3 (1914) Konsulat Jepang di Batavia kembali mendata orang Jepang di Indonesia dan mengelompokkan jenis pekerjaan mereka. Di antaranya terdapat *shoofu (kaji yatoi onna)* yang berarti pembantu rumah tangga merangkap istri simpanan. Jumlah *karayuki-san* yang menjadi istri simpanan di beberapa kota adalah sebagai berikut.

Tabel 4: Karayuki-san yang berstatus sebagai istri simpanan di beberapa kota di Indonesia

Kota	Jumlah
P.Jawa	
Batavia	23 orang
Semarang	1 orang
Surabaya	3 orang
Kota-kota lain	11 orang
P.Sumatera	
Medan	49 orang
Padang	1 orang
Kota-kota lain	35 orang
P.Kalimantan	
Pontianak	7 orang
Kota-kota lain	16 orang
P.Sulawesi	
Makassar	25 orang
Kota-kota lain	1 orang
Irian dan pulau sekitar	22 orang

Sumber: DRO 715.4 , Vol. 15, Surat Terbuka No. 157, tanggal 1 Juli 1914

Dalam sumber ini tidak disebutkan bangsa dari laki-laki yang menjadikan karayuki-san sebagai istri simpanan.

KONDISI SOSIAL KARAYUKI-SAN DI INDONESIA

Kondisi sosial yang dimaksud disini adalah perlakuan yang diterima oleh *karayuki-san* dalam berinteraksi dengan lingkungan masyarakat di Indonesia. Dalam perjalanan dari Jepang menuju daerah tujuan, *karayuki-san* banyak mengalami perlakuan yang tidak manusiawi dari orang-orang yang membawanya. Di Indonesia tetap ada yang mendapat perlakuan buruk, tetapi ada pula yang mendapat perlakuan relatif baik, terutama mereka yang menjadi istri simpanan orang Belanda dan Cina. Memang tidak sebaik perlakuan terhadap istri yang sah, tetapi paling tidak siksaan fisik, pemerasan hasil kerja seperti yang terjadi saat bekerja di rumah bordil tidak terjadi lagi. Tentang perlakuan yang dialami para *karayuki-san* dari "suami"nya, Konsul Ukita Satoji melaporkan sebagai berikut:

Mereka yang menjadi istri simpanan orang kulit putih biasanya setiap bulan menerima sejumlah uang (gaji), tetapi yang menerima perlakuan sama dengan istri sah tanpa menerima uang (gaji) pun ada. Mereka yang menjadi istri simpanan orang Cina dan mendapat gaji tiap bulan merupakan kasus khusus; pada umumnya mereka tidak mendapatkan gaji bulanan, hanya saja kadang-kadang menerima baju atau perhiasan emas dan perak. Kemudian setelah 3 atau 5 tahun saat orang Cina itu kembali ke Cina, pada beberapa kasus mereka menerima ratusan *kin*, tetapi banyak juga yang menerima sampai 2.300 *kin*. Baik orang kulit putih maupun orang Cina bersikap baik terhadap gundik Jepang itu, dan para perempuan itu juga nampaknya tidak memiliki rasa tidak puas atau diperlakukan tidak adil. Mereka yang menjadi gundik orang kulit putih biasanya mempunyai penampilan dan tingkah laku yang baik, tetapi yang menjadi gundik orang Cina kebanyakan kurang sopan dan jarang bergaul dengan orang Jepang pada umumnya (DRO 4.2.2.27, vol.4, Surat Rahasia No.7, tanggal 19 Maret 1913).

Perlakuan buruk pernah dialami oleh saudara tiri Osaki yang sekitar tahun 1910-an pergi ke Jawa dan bekerja di rumah bordil (Yamazaki, 1972:66-67). Ia kembali ke Jepang dalam keadaan tuli. Osaki sendiri tidak tahu perlakuan apa yang diterima oleh saudara tirinya itu. Bagi *karayuki-san* yang bekerja di rumah bordil, perlakuan buruk banyak dilakukan oleh para germo dengan memaksanya bekerja tanpa mengenal waktu, dan preman-preman yang berada di balik beroperasinya rumah bordil. Biasanya di balik sebuah rumah bordil ada satu atau dua orang preman yang sering memeras uang hasil kerja para pelacur dan menggunakannya untuk berjudi. Para germo ini berubah menjadi baik setelah jumlah *karayuki-san* yang datang di Indonesia makin berkurang. Perlakuan baik yang sangat dirasakan adalah diizinkan *karayuki-san* untuk bekerja sesuai dengan kondisi fisik dan kejiwaan, tanpa ada paksaan. Gaji juga

dibayarkan, tetapi baju dan kosmetik harus mereka beli dengan harga mahal (DRO 4.2.2.27, vol.4, Surat Rahasia No.7, tanggal 19 Maret 1913).

Selain masalah perlakuan, penderitaan yang dialami oleh *karayuki-san* juga terkait dengan kesehatan. Pekerjaan mereka sebagai pelacur sangat rentan terhadap penyakit kelamin, dan penyakit khas daerah tropis seperti malaria juga mereka alami. Kondisi seperti itu ditambah masalah psikologis mengakibatkan ada *karayuki-san* yang melakukan bunuh diri (Jagatara Tomo no Kai, 1978:17).

Di antara kondisi buruk seperti di atas, sebenarnya ada satu fakta yang memberikan celah bagi *karayuki-san* untuk mendapat kehidupan sosial yang lebih baik. Fakta itu adalah diskriminasi. Dari segi profesi, sikap merendahkan dan dianggap sebagai warga kelas dua sebenarnya hanya datang dari sesama warga Jepang yang pekerjaannya tidak terkait dengan pelacuran atau mereka yang melakukan pekerjaan "halal". Sikap merendahkan ini hanya berlatarbelakang faktor moralitas saja, karena secara umum masyarakat menganggap bahwa pelacur adalah profesi yang hina. Bahkan, jika profesi itu dilakukan di luar negeri, seperti *karayuki-san*, dianggap dapat merendahkan martabat bangsa (DRO 7.1.5.4, vol.1, Surat Rahasia No.14, tanggal 16 November 1895). Kontrol terhadap mereka biasanya menyangkut keabsahan dokumen keimigrasian dan perlakuan yang dialami oleh *karayuki-san* dari orang-orang di sekelilingnya. Sikap simpatik yang ditunjukkan oleh sesama warga Jepang, walaupun ada, biasanya muncul setelah warga Jepang tersebut memahami latar belakang kehidupan para perempuan tersebut sejak dari kampung halaman sampai tiba di Indonesia.

Pemerintah Indonesia pun mempunyai sikap yang tidak jauh berbeda. Peraturan yang dibuat oleh penguasa kolonial terhadap pelacuran bukanlah berlatarbelakang moralitas, tetapi lebih banyak menyangkut masalah kesehatan dan lokalisasi, karena banyak

pegawai pemerintah yang tertular penyakit kelamin akibat sering bergaul dengan para pelacur. Masalah moralitas lebih banyak ditangani oleh para misionaris bekerjasama dengan sebuah organisasi di Belanda yang menentang penculikan perempuan.

Berikutnya adalah diskriminasi ras yang justru menguntungkan bagi *karayuki-san* yang berada di Indonesia. Hal ini terjadi setelah Jepang mendapat status sejajar dengan ras Kaukasian pada tahun 1899 dari pemerintah Belanda. Tarif yang diberlakukan untuk *karayuki-san* semalam disamakan dengan orang kulit putih. Di wilayah timur, yaitu Makassar, Ambon, dan Irian, tarif mereka adalah 10 gulden, sedangkan untuk pelacur Cina dan penduduk asli berada di bawahnya, yaitu 7 gulden 50 sen. Hal ini berarti secara sosial *karayuki-san* lebih dipandang dari asal bangsanya, bukan pekerjaannya.

Karayuki-san sendiri juga sebenarnya bersikap diskriminatif terhadap laki-laki, khususnya yang akan menjadikannya istri simpanan. Orang kulit putih adalah pelanggan yang paling disukai, kemudian orang Cina, dan terakhir adalah orang pribumi (DRO 4.2.2.27, vol.4, Surat Rahasia No.7, tanggal 19 Maret 1913).

SIMPULAN

Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan berkaitan dengan *karayuki-san* dan prostitusi Jepang ini. Pertama, faktor ekonomi yang menjadi alasan kepergian *karayuki-san* ke luar negeri, ternyata tidak hanya menyangkut pribadi *karayuki-san* dan keluarganya, tetapi juga menyangkut orang-orang yang menjadi perantara atau *broker*. Kedua, hal yang tidak secara langsung berdampak positif adalah peran *karayuki-san* secara kultural, yaitu sebagai perantara untuk memperkenalkan Jepang kepada penduduk Indonesia, baik pribumi, Cina, maupun orang Belanda sendiri. Setelah tiba di Indonesia, mereka mempelajari bahasa Melayu. Tujuan utamanya memang untuk menjalin komunikasi dengan tamu, tetapi

hal itu menjadi amat berguna saat mereka berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya. Ketiga, diskriminasi yang ada di Indonesia masa kolonial secara sosial mampu meningkatkan kedudukan *karayuki-san*, karena sebagai warga Jepang yang disejajarkan dengan orang Eropa mereka mendapatkan perlakuan yang baik. Meskipun pekerjaan mereka oleh pemerintah Jepang sendiri dianggap mengotori martabat bangsa, tetapi pemerintah kolonial Belanda tetap memperlakukan mereka dengan baik. Budaya patriarki yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang diatur oleh kaum laki-laki ternyata relatif menipis saat *karayuki-san* berinteraksi dengan orang non Jepang, terutama orang Belanda.

DAFTAR RUJUKAN

- ANRI, BT 10 Agustus 1891 No. 4.
- Bingham, Marjorie Wall dan Gross, Susan Hill. 1987. *Woman in Japan : From Ancient De Indische Gids* tahun 1907 (II) dan tahun 1910 *Times to the Present*. Minnesota: Woman in World Area Studies.
- Ingleson, John. 1986. "Prostitution in Colonial Java" dalam D.P.Chandler and M.C.Ricklefs, (ed), *Nineteenth and Twentieth Century Indonesia*. Victoria : Southeast Asian Studies, Monash University.
- Inoue, Mitsusada; Kasahara, Kazuo. 1993. *Shin Shoosetsu Nihonshi*. Tokyo: Yamakawa Shuppansha.
- Jagatara Tomo no Kai Hen. 1978. *Jagatara Kanwa: Ranin Jidai Hoojin no Ashiato*. Tokyo: Jagatara Tomo no Kai.
- Kuntowijoyo. 2003. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana. Lampiran surat tanggal 31 Desember 1909 dalam DRO 715.4, volume 8.
- Mori, Katsumi. 1959. *Jinshin Baibai*. Tokyo: Shibundo.
- Morisaki, Kazue. 1976. *Karayuki-san*. Tokyo: Asahi Shinbunsha.
- Muraoka, Iheiji. 1960. *Muraoka Iheiji Jiden*. Tokyo: Nampoosha. *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*. 1995. Oxford: Oxford University Press.
- Kartodirdjo, Sartono. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Schoorl, J.W. 1981. *Modernisasi: Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-negara Sedang Berkembang*. Terjemahan R.G. Soekardijo. Jakarta: PT Gramedia.
- Shimizu, Hiroshi, 1992 "Rise and Fall of the *Karayuki-san* in the Netherlands Indies from the late Nineteenth Century to the 1930s " dalam *Review of Indonesian and Malaysian Affairs*, vol.26, Sidney: The Department of Southeast Asian Studies, University of Sidney,
- Sone, Sachiko, 1992 " The *Karayuki-san* of Asia 1868-1938 The Role of Prostitutes Overseas in Japanese Economic and Social Development" dalam *Review of Indonesian and Malaysian Affairs*, vol.26. Sidney: The Department of Southeast Asian Studies, University of Sidney.
- Surat Rahasia No.7, tanggal 19 Maret Taisho 2 (1913) dalam DRO 422.27, volume 8.
- Surat Rahasia No. 14, tanggal 16 Nopember Meiji 28 (1895) dalam DRO (Diplomatic Record Office) 715.4, volume 1.
- Surat Terbuka No. 38, tanggal 13 Juni 1906 dalam DRO 715.4, volume 4.
- Surat Terbuka No. 38, tanggal 14 Maret Meiji 45 (1912) dalam DRO 715.4, volume 4.
- Surat Terbuka No. 199, tanggal 10 September 1913 dalam DRO 422.27, volume 4.0
- Surat Terbuka No. 157, 1 Juli 1914 dalam DRO 715.4 , volume 15.
- Surat Terbuka No. 84, tanggal 15 April 1915 dalam DRO 4.2.2.27, volume 8
- Truong, Thanh Dam. 1992., *Seks, Uang, dan Kekuasaan: Pariwisata dan Pelacura di Asia Tenggara*, terj. Ade Armando. Jakarta: LP3ES.
- Warren, James Francis. 1992 "Lives of the Ah Ku and *Karayuki-san* of Singapore: Their Lives, Sources, Method and A Historian's Representation" dalam *Review of Indonesian and Malaysian Affairs*, vol.26. Sidney: The Department of Southeast Asian Studies, University of Sidney.
- Yamazaki, Tomoko. 1972. *Sandakan Hachi ban Shookan*. Tokyo: Chikuma Shoboo.
- . 1995. *Ajia Josei Kooryuu shi*. Tokyo : Chikuma Shoboo.
- Yano, Tooru . 1975. "Nanshin " no Keifu. Tokyo: Chuuoo Kooron sha.